

# Pelatihan Siskeudes (Sistem Keuangan Desa) Bagi Mahasiswa Universitas Terbuka Pekanbaru Program Beasiswa CSR

R. Septian Armel<sup>1\*</sup>, Adriyanti Agustina Putri<sup>2</sup>, Evi Marlina<sup>3</sup>, Rama Gita Suci<sup>4</sup>, Siti Rodiah<sup>5</sup>, Zul Azmi<sup>6</sup>, Intan Putri Azhari<sup>7</sup>

Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Riau

\*e-mail: [septianarmel@umri.ac.id](mailto:septianarmel@umri.ac.id)

## Abstract

*The purpose of the SISKEUDES (Village Fund System) PKM training activities for students of the Pekanbaru Terbuka University CSR scholarship program is to increase students' understanding and skills in managing village fund with the SISKEUDES application. The main problem is that students' knowledge and skills about the village financial system are still low and students as part of the community must understand village fund because community participation is needed. In general, the use of SISKEUDES is to carry out village administration, including planning, budgeting, administration and entry data. The approach method offered to achieve the output target is SISKEUDES training for students of the Pekanbaru Terbuka University CSR scholarship program. The result of this PKM is the increased understanding and skills of students of the Pekanbaru Terbuka University CSR scholarship program towards SISKEUDES.*

**Keywords:** SISKEUDES, training, village fund

## Abstrak

*Tujuan kegiatan PKM pelatihan SISKEUDES (Sistem Keuangan Desa) bagi mahasiswa program beasiswa CSR Universitas Terbuka Pekanbaru adalah meningkatkan pemahaman dan keterampilan mahasiswa dalam pengelolaan keuangan desa dengan aplikasi SISKEUDES. Masalah utamanya adalah pengetahuan dan keterampilan mahasiswa tentang sistem keuangan desa masih rendah dan juga mahasiswa sebagai bagian dari masyarakat harus memahami keuangan desa karena partisipasi masyarakat sangat diperlukan. Pada umumnya pemanfaatan SISKEUDES adalah untuk melaksanakan administrasi desa antara lain membuat perencanaan, penganggaran, penatausahaan dan pembukuan. Metode pendekatan yang ditawarkan untuk mencapai target luaran adalah pelatihan SISKEUDES bagi mahasiswa program beasiswa CSR Universitas Terbuka Pekanbaru. Hasil PKM ini adalah meningkatnya pemahaman dan keterampilan mahasiswa program beasiswa CSR Universitas Terbuka Pekanbaru terhadap SISKEUDES.*

**Kata kunci:** SISKEUDES, Pelatihan, Keuangan Desa

## 1. PENDAHULUAN

Pada sistem pemerintahan yang ada dan berlaku saat ini, desa mempunyai peran yang strategis dan penting dalam membantu pemerintah daerah dalam proses penyelenggaraan pemerintahan, termasuk pembangunan. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, desa memiliki kewenangan sebagai daerah otonom. Kewenangan tersebut disertai dengan dana yang akan diberikan kepada desa berupa Dana Desa dari Pemerintah Pusat dan Alokasi Dana Desa (ADD) dari tingkat provinsi/kabupaten/kota (Republik Indonesia, 2014). Agar penggunaan dana desa menjadi efektif dan efisien, maka diperlukan pengelolaan keuangan yang baik. Pengelolaan keuangan yang baik salah satunya harus mengacu pada asas-asas pengelolaan keuangan itu sendiri (Martini dkk., 2018). Asas-asas pengelolaan keuangan desa tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) nomor 113 tahun 2014, yaitu transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran (Republik Indonesia, 2014).

Beberapa disiplin anggaran yang perlu diperhatikan dalam pengelolaan keuangan desa (Republik Indonesia, 2014) yaitu: 1) Pendapatan yang direncanakan merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan, sedangkan belanja yang dianggarkan merupakan batas tertinggi pengeluaran belanja; 2) Pengeluaran harus didukung dengan adanya kepastian tersedianya penerimaan dalam jumlah yang cukup dan tidak

dibenarkan melaksanakan kegiatan yang belum tersedia atau tidak mencukupi kredit anggarannya dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)/Perubahan APBDes; 3) Semua penerimaan dan pengeluaran daerah dalam tahun anggaran yang bersangkutan harus dimasukkan dalam APBDes dan dilakukan melalui Rekening Kas Desa (BPKP). Peraturan Pemerintah nomor 43 tahun 2014 pasal 93, menyatakan pengelolaan keuangan desa terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban (Republik Indonesia, 2014). Selain itu proses penyusunan anggaran desa (APBDes) harus dilakukan secara partisipatif serta tertib dan disiplin anggaran (Julita dan Abdullah, 2020) dan juga setiap tahapan kegiatan pengelolaan keuangan desa harus dilaporkan oleh pemerintah desa sebagai bentuk pertanggungjawaban atas penggunaan dana desa.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, pemerintah mengalokasikan Dana Desa. Dana desa merupakan dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi desa dan desa adat yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, serta pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan. Desa diberikan kewenangan untuk mengelola sendiri dana desa untuk kesejahteraan masyarakat desa. Implementasi UU tersebut dibutuhkan pengawasan dari pemerintah pusat agar tidak terjadi penyelewengan dana desa. Indonesia Corruption Watch (ICW) mendata 1.053 perkara tindak pidana korupsi dengan 1.162 terdakwa. Perangkat desa, menempati posisi tiga profesi paling banyak melakukan korupsi. Kepala Inspektorat Bangkalan menyatakan pelaksanaan DD dan ADD harus dikelola dengan profesional dan integritas. Hasil pengawasan inspektorat masih ditemukan kelemahan. Antara lain dalam pelaksanaan perpajakan, lambannya penyelesaian infrastruktur. Sementara, anggaran sudah diserap dan keterlibatan masyarakat juga belum optimal.

Berbagai solusi telah dilaksanakan oleh pemerintah, diantaranya adalah dikeluarkannya SISKEUDES yaitu aplikasi untuk pengelolaan Dana Desa mulai dari perencanaan & penganggaran, pengadministrasian, pelaporan & pertanggungjawaban. Aplikasi ini untuk mempermudah administrasi serta kontrol internal yang tersistem dan berlaku secara nasional sebagaimana instruksi dari Presiden. SISKEUDES ini dikembangkan oleh BPKP, namun demikian dalam pelaksanaannya belum bisa diaplikasikan oleh seluruh desa karena keterbatasan SDM yang memberi pelatihan (Solikhah, Subowo dan Yulianto, 2018).

Berdasarkan analisis situasi dan hasil diskusi dengan koordinator mahasiswa Universitas Terbuka Pekanbaru program beasiswa CSR dan tim Universitas Terbuka Pekanbaru menunjukkan bahwa pengetahuan dan pemahaman mahasiswa Universitas Terbuka Pekanbaru program beasiswa CSR terkait keuangan desa masih rendah, padahal mereka juga merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari masyarakat. Oleh karena itu perlu dilakukan pelatihan agar keterlibatan masyarakat bisa optimal. Keterlibatan masyarakat sangat penting dalam kemajuan pengaplikasian SISKEUDES. Pada umumnya pelaksanaan SISKEUDES meliputi, administrasi desa antara lain membuat perencanaan, pengajuan dan Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) desa. Manfaat kegiatan pelatihan ini adalah untuk menambah wawasan, pengetahuan dan juga pemahaman mahasiswa tentang sistem keuangan desa.

## 2. METODE

Sebelum melaksanakan kegiatan, penulis telah diberikan pelatihan oleh BPKP tentang pengoperasian SISKEUDES. Pembekalan materi oleh operator dari kecamatan yang ada di Kabupaten Meranti sekaligus penginstalan SISKEUDES. Pengabdian ini dilakukan dengan metode pendampingan dan pelatihan. Metode yang digunakan untuk menyelesaikan permasalahan mitra yaitu memberikan pelatihan kepada mahasiswa Universitas Terbuka Pekanbaru program beasiswa CSR tentang sistem keuangan desa menggunakan aplikasi SISKEUDES. Pemateri pelatihan adalah dosen Universitas Muhammadiyah Riau yang memiliki kompetensi dalam bidang yang bersangkutan.

Metode yang digunakan dalam pengabdian ini adalah melalui ceramah dan diskusi Tanya jawab serta simulasi secara langsung yang dilakukan kepada 40 mahasiswa Universitas Terbuka Pekanbaru program Beasiswa CSR. Indikator keberhasilan kegiatan PKM ini adalah meningkatnya pemahaman dan pengetahuan mahasiswa Universitas Terbuka Pekanbaru program beasiswa CSR terkait sistem keuangan desa.

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil kegiatan PKM pelatihan SISKEUDES kepada mahasiswa Universitas Terbuka Pekanbaru program beasiswa CSR yaitu meningkatkan pemahaman dan pengetahuan mahasiswa dalam pengelolaan keuangan desa dengan aplikasi SISKEUDES.

Administrasi keuangan Desa pada saat ini sudah menggunakan aplikasi SISKEUDES. Oleh karena itu, materi administrasi keuangan desa difokuskan pada pengetahuan tentang akuntansi dalam penganggaran, penatausahaan dan pembukuan desa. Penataan keuangan desa antara lain buku kas umum desa, buku pembantu bank, buku pembantu penerimaan, buku pembantu kegiatan, buku pembantu pajak, buku rekapitulasi panjar, registrasi SPP pengeluaran dan register kwitansi pengeluaran. Pembukuan keuangan desa antara lain laporan realisasi APBDes dan laporan kekayaan milik desa.

Materi pertama pelatihan SISKEUDES tentang perencanaan yaitu mahasiswa diberi pemahaman tentang membuat visi misi dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Desa (RPJM Desa). Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa selanjutnya disingkat RPJM Desa adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun, dan Rencana Pembangunan Tahunan Desa atau yang disebut Rencana Kerja Pemerintah Desa, merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa merupakan satu-satunya dokumen perencanaan di Desa dan merupakan pedoman dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang diatur dalam Peraturan Pemerintah. Mahasiswa Universitas Terbuka Pekanbaru program beasiswa CSR mengentri visi misi desa yang menjadi dasar dalam membuat perencanaan kegiatan desa dalam bidang penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat desa.

Materi kedua pelatihan SISKEUDES yaitu penganggaran desa terdiri dari pendapatan desa dan belanja dan pembiayaan. Pendapatan desa berasal dari DD, ADD, Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah, Bantuan Pemerintah Provinsi dan Pendapatan Asli Desa (PADes). Belanja desa meliputi kegiatan penyelenggaraan pemerintah desa, kegiatan pembangunan desa, kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan pembinaan masyarakat desa.

Proses Perencanaan dan Penganggaran Keuangan Desa membutuhkan keselarasan kebijakan pembangunan yang tertuang dalam dokumen perencanaan dan penganggaran pemerintah daerah kabupaten/kota. Dan penetapan peraturan desa mengenai perencanaan dan penganggaran keuangan desa juga tidak boleh bertentangan dengan ketentuan yang lebih tinggi.

Hasil dari pelatihan SISKEUDES ini adalah mahasiswa Universitas Terbuka Pekanbaru program beasiswa CSR dapat menyusun RPJMDes, RKPDes dan APBDes sesuai aturan dan juknis peraturan desa. Penerapan SISKEUDES memberikan dampak yang positif. SISKEUDES mendukung penyediaan informasi data yang cepat, tepat, dan akurat karena setiap data anggaran yang diinput akan disimpan dalam aplikasi dan bisa dilihat kapan saja dibutuhkan sehingga dapat menghasilkan pelaporan keuangan yang sesuai dengan waktu yang ditentukan (Juardi dkk., 2018), data akurat karena seluruh perhitungan dilakukan otomatis oleh aplikasi. SISKEUDES mendukung tujuan SIA yaitu menghasilkan informasi yang cepat, tepat, dan akurat juga berguna dalam menjaga kekayaan daerah melalui pelaksanaan prosedur yang diawasi (Novita, 2016) dan dan (Martini dkk., 2018). Kendala – kendala yang ditemui pada kegiatan PKM ini antara lain, pada kegiatan pelatihan masih ada beberapa mahasiswa yang masih awam dalam

penggunaan aplikasi SISKEUDES sehingga memakan cukup banyak waktu untuk menjelaskan. Selama pelaksanaan kegiatan ditemukan penggunaan aplikasi SISKEUDES belum optimal.



Gambar 1. RPJM Desa

Proses penginputan data RPJM Desa yang dimulai dari penginputan Visi dan Misi Desa dan dilanjutkan dengan penginputan misi, tujuan, dan sasaran. Penginputan RPJM Desa ini nantinya akan menyelaraskan data sesuai dengan data kegiatan yang nantinya akan dilaksanakan. Dalam proses ini juga diinput data mengenai Data Umum Desa seperti, nama kepala desa, nama sekretaris desa, nama kepala urusan keuangan desa, tanggal peraturan desa dan tanggal peraturan desa perubahan (PAK).



Gambar 2. Penganggaran Desa

Proses penginputan data Penganggaran Desa yang dimulai dari pemilihan Bidan, Sub Bidang, Kegiatan, dan paket kegiatan (jika ada). Data kegiatan ini harus dilengkapi dengan atribut yang meliputi kode, nama kegiatan, lokasi, waktu pelaksanaan, nama pelaksana kegiatan, keluaran dan pagu anggaran setahun.



Gambar 3. Proses Pendampingan Pelatihan

#### 4. KESIMPULAN

Kegiatan PKM pelatihan SISKEUDES pada mahasiswa Universitas Terbuka Pekanbaru Pokjar Rengat adalah untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan mahasiswa tentang administrasi desa, dan untuk meningkatkan pemahaman mahasiswa tentang aplikasi SISKEUDES dan regulasi peraturan tentang desa. Penerapan aplikasi SISKEUDES dalam pengoperasiannya telah sesuai prosedur dari BPKP, namun belum optimal. Faktor utama yang menghambat penerapan SISKEUDES adalah lemahnya sumber daya manusia dan terbatasnya fasilitas yang memadai. Pelatihan berkelanjutan sangat diperlukan untuk meningkatkan kemampuan dan daya ingatnya terkait pengoperasian aplikasi SISKEUDES. Sehingga dengan diadakannya pelatihan yang berkelanjutan, diharapkan mahasiswa Universitas Terbuka Pekanbaru Pokjar Rengat yang berdomisili dekat dengan desa diharapkan dapat membantu sumber daya desa yang kurang memadai dalam pemahaman tentang SISKEUDES.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Juardi, M. S., Muchlis, M., & Putri, R. A. (2018). Evaluasi Penggunaan Aplikasi SISKEUDES dalam Upaya Peningkatan Kualitas Akuntabilitas Keuangan Desa (Studi pada Desa Jenetallasa Kec. Pallangga Kab. Gowa). *Jurnal Ilmiah Akuntansi Peradaban*.
- Julita, Eva. Abdullah, Syukriy. (2020). Transparansi dalam Pengelolaan Dana Desa (Studi di Kecamatan Sukakarya Kota Sabang). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA)* Vol. 5, No. 2, (2020) Halaman 213-221.
- Martini, R., Agustin, R., Fairuzdita, A., Murinda. A. N. (2019). Pengelolaan Keuangan Berbasis Aplikasi Sistem Keuangan Desa.
- Novita, (2016). Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun 2016 di Desa Karya Bhakti Kecamatan Muara Wahau Kabupaten Kutai Timur

- Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Desa.  
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan Dalam Negeri di Kabupaten/Kota.  
Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa.  
Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 113 Tahun 2014. Pengelolaan Keuangan Desa  
Peraturan Pemerintah (PP) tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa  
Solikhah. B, Subowo, Yulianto. A. (2018). Mewujudkan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Dengan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes). Proceeding SNK-PPM vol 1.  
Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.  
Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.